

SEMEN PADANG DAN POLITIK EKONOMI KOLONIAL

Gusti Asnan

Staf Pengajar Jur. Sejarah, Fak. Sastra, Univ. Andalas

gasnan@yahoo.com

Hp. 081363411291

Abstract

This article looks at the history and development of Padang Cement Fabric in its relationship with the Dutch economic policy by the end of the 19th C. and in the beginning of the 20th C. The foundation of the oldest cement fabric in Indonesia had a close relationship with political-economic policy introduced by the Dutch colonial government, which gave many opportunities to the foreign investors to exploit its colony. Padang Cement Fabric itself only one of several fabrics, minings, and big plantations in which the investors invested their capital during the liberal era in West Sumatra. The construction of Padang Cement Fabric also represented colonial government policy in urban planning in Padang municipality. In the beginning of the 20th C., the development orientation of Padang was directed to the eastward and southward of the city. Besides that, to encourage the investors and to implement its urban planning policy, colonial government provided special supports, such as introducing regulations to reduce administrative process for investors to invest their money in this region. The government even sacrificed the native peoples in order to succeed its colonial political-economic.

Keywords: *Padang Cement, colonial economic policy, liberal economy, West Sumatra.*

A. PENDAHULUAN

Semen Padang telah hadir lebih 100 tahun di panggung sejarah Sumatera Barat khususnya dan Indonesia Indonesia pada umumnya. Dalam pandangan sejarah urang awak tempo doeloe Semen Padang adalah sebuah perusahaan “tiga zaman” (zaman Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia), namun berdasarkan perspektif sejarah terkini, pada zaman republik saja - mengacu kepada periodisasi sejarah politik Indonesia - Semen Padang setidaknya telah melalui lima zaman, yaitu masa revolusi, periode demokrasi liberal, era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tanpa mengurangi makna zaman Belanda dan Jepang, menyebut lima zaman pada era republik adalah sangat penting karena pengalaman Semen Padang di lima zaman terakhir era kemerdekaan tidak kalah menariknya dengan dua zaman di era kolonial. Dalam zaman-zaman inilah ‘bussiness as unusual’, seperti yang dipopulerkan Campo dialami oleh Semen Padang. Berbagai pengalaman dalam perjalanannya selama satu abad dan dalam berbagai era itu telah dikemukakan dalam *Indarung: Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia* buah karya Mestika Zed, Hasril Chaniago dan Khairul Jasmi yang diterbitkan tahun 2001.

Karena telah cukup dalam dan komprehensifnya penelitian serta penulisan sejarah perusahaan ini (dan dalam waktu dekat akan dilakukan ‘penyempurnaan’ buku tersebut), maka pada kesempatan ini saya tidak akan banyak membahas sejarah Semen Padang pada masa Belanda dan Jepang, seperti yang diminta panitia kepada saya. Biarlah para penulis yang telah

merancang 'penyempurnaan', 'penulisan ulang' atau 're-rekonstruksi' sejarah Semen Padang ini yang bertungkuslumus melakukannya. Dengan berbagai keterbatasan, terutama akses untuk mendapatkan sumber, tidak mungkin bagi saya dalam waktu yang relatif singkat mendalami pengalaman perusahaan ini di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Apalagi, seperti disebut Suryadi, sangat banyak bahan berkenaan dengan Semen Padang pada masa Belanda ini (*Singgalang*, 26 Januari 2010). Namun demikian, saya akan menampilkan persoalan yang sesungguhnya menjadi bagian terpenting dari perjalanan sejarah perusahaan ini, yaitu Semen Padang dan politik ekonomi kolonial (tepatnya politik ekonomi liberal). Persoalan ini menarik dibahas setidaknya karena dua hal utama: pertama, dalam buku Mestika Zed dkk. persoalan ini relatif terabaikan, padahal kehadiran Semen Padang berkaitberkelindan dengan politik ekonomi yang dijalankan pemerintah kolonial pada masa itu; kedua, sehubungan dengan peserta acara ini yang hampir semuanya adalah guru sejarah di Sumatera Barat, saya ingin memberi contoh yang lebih dekat mengenai praktik ekonomi kolonial (politik ekonomi liberal), yang menjadi salah satu materi pengajaran sejarah kepada anak didik, pada kasus yang lebih dekat dengan kita, yakni Semen Padang khususnya dan berbagai perusahaan pertambangan serta perkebunan lainnya di Sumatera Barat umumnya. Selama ini, contoh-contoh mengenai praktik ekonomi liberal umumnya diambilkan dari pengalaman di Pulau Jawa semata. Kebetulan, berapa waktu yang lalu saya pernah melakukan penelitian mengenai praktik politik ekonomi kolonial di Sumatera Barat dan hasil penelitian tersebut belum sempat "dijual" kepada audien yang lebih luas (Gusti Asnan 2007; 1991). Karena itu, bahan utama makalah ini juga diambilkan dari hasil-hasil penelitian tersebut.

B. METODOLOGI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. NV-NIPCM dan Politik Ekonomi Liberal

Ketika pertama kali didirikan Semen Padang dinamakan *Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij*, dan sebagai sebuah badan usaha dia berbentuk *Naamlooze Venotschap*, sehingga bila disingkatkan namanya menjadi NV-NIPCM. Sebagai sebuah badan hukum, perusahaan ini dilegalkan keberadaannya berdasarkan akta notaris Johannes Piter Smits No. 358 yang berkedudukan di Amsterdam tanggal 18 Maret 1910.

Menurut *Particuliere Landbouw Nijverheid: Lijst van Ondernemingen 1916* (1916: 332) yang dikeluarkan Departement van Binnenlandsch Bestuur, NIPCM didirikan pada sebidang tanah yang menurut pihak agraria berada pada perceelen Indarung I dan Indarung II serta Bukit Ngalau I dan Bukit Ngalau II. Meskipun dilegalkan keberadaan tahun 1910 sesungguhnya proses pembangunannya sudah dimulai tahun 1907, dan "ribut-ribut" pembangunannya telah menghiasi surat kabar dan majalah terbitan Padang sejak beberapa tahun sebelumnya. *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang* (Kadin Padang) termasuk salah satu lembaga yang ikut serta dalam hiruk pikuk menyambut kehadiran pabrik semen ini, dan lembaga ini berada pada pihak menyambut kehadirannya dengan sangat positif. Beberapa edisi *Verslag van Koophandel en Nijverheid te Padang* (selanjutnya disebut *VKKNP*) yang dipublikasikan sejak tahun-tahun pertama abad ke-20 hampir selalu memasukan rencana akan proses pembangunan pabrik ini (*VKKNP* dari berbagai edisi).

Pembangunan NIPCM ini beriringan dengan pembangunan sejumlah pabrik serta tambang emas (perak) di Sumatera Barat. Dan pembangunan pabrik serta tambang memang sangat marak di Sumatera Barat waktu itu. Seperti diungkapkan Joustra, di samping pabrik semen pada saat yang hampir bersamaan juga dibangun pabrik minyak (makan) (seperti *Oliefabrik van Jurgen* dan *N.V. Oliefabrik Insulinde*). Selanjutnya Joustra menyebut bahwa sejak tahun 1904 hingga 1919 telah dibuka sebanyak 19 tambang emas (perak) di daerah ini, yakni tambang Sinabuan yang dimiliki oleh J. Berkerbach v.d. Sprenkel di *Afdeeling Lubuksikaping*¹ dibangun tahun 1904, tambang Sidingin milik Fa. Gebr. Veth di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1904, tambang Batangsilayang milik Th. Va. Zimmerman di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1906, tambang Abei milik R.D. Verbeek di *Afdeeling Tanahdatar* dibangun tahun 1907, tambang Silungkang di milik N.V. Mijnbouw Maatschappij Silungkang di *Afdeeling Tanahdatar* dibangun tahun 1908, tambang Salido milik N.V. Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij di *Afdeeling Painan* dibangun tahun 1909, tambang Sarik, milik N.V. Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij di *Afdeeling Painan* dibangun tahun 1909, tambang Equator milik N.V. Mijnbouw Maatschappij Aequator di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1910, tambang Bangket milik N.V. Mijnbouw Maatschappij Aequator di *Afdeeling Lubuksikaping* dan Limapuluh Kota dibangun tahun 1911, tambang Charlotte milik N.V. Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1914), tambang Pagadis milik Mijnbouw Maatschappij Aequator di *Afdeeling Limapuluh Kota* dibangun tahun 1914, tambang Soempu milik Fa. Gebroeder Veth di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1914, tambang Sungai Alei milik N.V. Mijnen Syndicaat Sei. Pagu di *Afdeeling Solok* dibangun tahun 1916, tambang Sungai Puding milik N.V. Mijnen Syndicaat Sei. Pagu di *Afdeeling Solok* dibangun tahun 1916, tambang Irma milik C.E.G.H.M.L. Hundeshagen di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1915, tambang Helena milik N.V. Kinandam Sumatra Mijnbouw Maatschappij di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1916, tambang Heinrich milik J.A. Beer di *Afdeeling Solok* dibangun tahun 1919, tambang Augusta milik C.E.G.H.M.L. Hundeshagen di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1919, dan tambang Ilse milik C.E.G.H.M.L. Hundeshagen di *Afdeeling Lubuksikaping* dibangun tahun 1915 (Joustra 1926: 223, 225).

Sebelum “demam” pembangunan pabrik dan tambang ini, Sumatera Barat juga dilanda “wabah” pembukaan perkebunan besar (*Ondernemingen*). Menurut *Particuliere Landbouw Nijverheid*.... perkebunan besar di Sumatera Barat dibuka pertama kali tahun 1877. Pada tahun itu dibuka tiga perkebunan besar sekaligus di daerah ini, dua di *Afdeeling Solok*, tepatnya di Surian dan Kayu Kalek, serta satu di *Afdeeling Tanah Datar*, yaitu di Gaduang. Sejak pembukaan pertama kali itu hingga dekade kedua abad ke-20 tercatat 158 persil yang diberi izin untuk digarap guna dijadikan perkebunan besar di delapan *afdeeling* yang ada di Sumatera Barat waktu itu. Namun pada tahun 1917 hanya tercatat 96 perkebunan yang pernah dibuka, dan dari

¹ *Afdeeling* adalah penyebutan untuk daerah administratif setara dengan kabupaten dewasa ini. Informasi mengenai jumlah *afdeeling* ada pada saat itu khususnya dan yang pernah di Sumatera Barat pada umumnya lihat Gusti Asnan, *Pemerintah Daerah Sumatera Barat: Dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Dian Pustaka, 2006).

96 itu hanya 24 perkebunan yang masih beroperasi dengan total luas 34.000 bau,² sedangkan sebanyak 72 perkebunan, dengan luas 110.000 bau tidak ada kabar beritanya.

Perkebunan-perkebunan besar ditanami dengan berbagai jenis tanaman perdagangan. Namun, karena Sumatera Barat memiliki topografi yang berbeda pada masing-masing sub-daerahnya, maka tanaman yang ditanam di perkebunan-perkebunan besar di masing-masing daerah itu juga berbeda. Kopi sebagai tanaman yang tidak suka hawa terlalu panas menyebabkannya banyak ditanam di daerah *darek*, seperti *Afdeeling* Solok, Agam, Tanah Datar, Batipuh dan Lubuk Sikaping. Sedangkan kelapa yang cocok di daerah pesisir banyak ditanam di *Afdeeling* Padang dan Pariaman (Gusti Asnan 1991: 26-29).

Berdasarkan jenis tanaman yang ditanam dan dikaitkan dengan periode penanamannya, maka perkebunan besar di Sumatera Barat dapat dibagi ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama muncul pada akhir abad ke-19 dan bentuk kedua pada permulaan abad ke-20. Perkebunan besar bentuk pertama cenderung ditanami kopi (dengan lokasi seperti yang disebut di atas), dan bentuk kedua ditanami teh, tembakau, kina, karet dan cassiavera dengan lokasi-lokasinya antara lain teh di Solok, Limapuluh Kota (Sago), Ophir (Tanang Talu), tembakau di Limapuluh Kota, kina di Solok dan Tanah Datar, karet di Batipuh, Muara labuh, Lubuksikapng, cassiavera di Solok (*VKKNP*.... dari berbagai laporan tahunan).

Para pemilik perkebunan besar ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu orang Eropa dan timur asing dan 'bumiputera'. Orang Eropa adalah warga Sumatera Barat keturunan Eropa (dan juga indo). Dari 96 perkebunan besar 41 di antaranya dimiliki oleh orang Eropa. Timur asing terdiri dari warga Sumatera Barat keturunan China, India dan juga Jepang. Kelompok yang dalam literatur kolonial dinamakan *Vreemde Oosterlingen* ini memiliki sebanyak 33 perkebunan besar, dan sisanya sebanyak 2 perkebunan besar milik urang awak.

Sesuai dengan ciri ekonomi kolonial yang didominasi oleh hadirnya 'perusahaan moderen', maka sebagian besar pemilik modal tersebut membuka usaha mereka dalam bentuk perusahaan. Beberapa di antaranya adalah NV. Cultuur Maatschappij Padang, NV. Sumatra Thee Maatschappij, N.V. Cultuur Syndicaat Ophir, Cultuur Maatschappij Surian, N.V. Landbouw Maatschappij Bukit Gompong, Cultuur Maatschappij Taluk Gunung, Cultuur Maatschappij Likilanden, dlsbnya.

Berdasarkan lokasi di mana perkebunan besar berada, maka pemilik modal Eropa memiliki lahan usaha secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Konsentrasi kepemilikan pengusaha China di Solok dan Painan. Perkebunan milik pengusaha India hanya ada di kawasan Padang dan Jepang di Kayutanam.

Proses produksi dilaksanakan dengan cara 'profesional'. Perkebunan dikerjakan oleh para buruh dan diawasi oleh para mandor yang digaji. Berkenaan dengan buruh, karena orang Minang umumnya tidak mau menjadi buruh (kuli) maka banyak perkebunan mendatangkan kuli mereka dari luar daerah. Ada dua pengertian 'luar daerah' di sini. Pertama daerah (*afdeeling*)

² 1 bau setara dengan 0,7 ha.

lain di Sumatera Barat dan kedua daerah lain di luar Sumatera Barat. Untuk menyebut satu contoh untuk kasus yang pertama adalah perkebunan teh Tanah Talu. Ketika perkebunan ini dibuka, dalam fase pembersihan lahan, pihak pengelola kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Hampir tidak ada warga daerah itu yang mau bekerja sebagai kuli. Untuk pihak pemilik perkebunan berusaha mendatangkan kuli dari daerah (*afdeeling*) lain di Sumatera Barat, yaitu dari kawasan sekitar Singkarak dan juga Tanah Datar. Ketika perkebunan mulai menghasilkan, maka pihak perusahaan terpaksa pula mendatangkan tenaga pemetik daun dari Jawa Barat (ini dilakukan karena buruh lokal tidak memiliki keahlian untuk melakukan itu) (Bernard 1913: Bijlage F). Contoh yang sama bisa ditemukan pada berbagai perkebunan lainnya.

Dalam rangka memudahkan pengelolalan perkebunan dan distribusi hasil perkebunan mereka telah tersedia prasarana dan sarana transportasi ke dan dari perkebunan-perkebunan mereka.

Hadirnya NIPCM, dan sejumlah pabrik, tambang dan perkebunan besar di Sumatera Barat sejak perempat terkahir abad ke-19 adalah bagian dari perkembangan sejarah daerah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kehadiran mereka itu berhubungan dengan dipraktikkannya politik ekonomi liberal.

C. PEMBAHASAN

1. Politik Ekonomi Kolonial

Pada pertengahan abad ke-19 terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Belanda. Pada waktu itu golongan konservatif yang pada masa-masa sebelumnya menguasai parlemen Negeri Kincir Angin itu dikalahkan oleh golongan liberal. Beberapa kebijaksanaan pemerintahan konservatif yang dijalankan sebelumnya, terutama yang menyangkut wilayah Hindai Belanda dikiritisi oleh golongan yang didominasi oleh kalangan pengusaha ini. Kритikan dan sorotan yang paling tajam diarahkan terhadap praktik *cultuur-stelsel* atau tanam paksa terhadap berbagai jenis tanaman perdagangan yang sangat laku di pasar Eropa khususnya dan dunia umumnya saat itu, seperti kopi, nila (indigo), tembakau, tebu, teh, kayu manis dan kapas.

Praktik tanam paksa menurut golongan liberal memang telah berhasil mengisi kembali pundi-pundi keuangan pemerintah Belanda. Sebagai contoh sejak tahun 1832 sampai dengan 1867 saldo keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda dari sistem tanam paksa ini mencapai jumlah total 967 juta gulden (Burger 1977: 229). Tetapi di sisi lain, golongan liberal melihat bahwa praktik tanam paksa ini telah betul-betul menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Tragedi yang dialami rakyat Cirebon tahun 1843 dan kemudian menyusul Demak tahun 1847, serta Grobogan tahun 1849 dan 1850, yakni meninggalnya ribuan orang di ke tiga wilayah tersebut merupakan modal utama yang digunakan oleh golongan liberal untuk mengeritik praktik tanam paksa.

Tahun 1867 dikeluarkan maklumat mengenai penghentian tanam paksa. Sejak dikeluarnya peraturan penghapusan tanam paksa tersebut, Indonesia pada umumnya memasuki suatu zaman baru, zaman ekonomi liberal. Zaman ini berlangsung di Indonesia hingga permulaan abad ke-20 khususnya, namun sesungguhnya berlanjut hingga hengkangnya Belanda dari negeri ini.

Kendati pun demikian, di berbagai daerah (seperti Sumatera Barat) praktik tanam paksa, terutama kopi masih tetap berlanjut.³

Dengan diterapkannya politik ekonomi liberal, berarti terbukalah suatu lembaran baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, karena pada waktu itulah untuk pertama kalinya sejarah negeri ini dimasuki oleh modal swasta secara besar-besaran (dan tentu saja oleh berbagai bentuk badan usaha 'modern'). Pemilik-pemilik modal, baik yang berasal dari Negeri Belanda serta negara-negara Eropa lainnya diberi kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk usaha di negeri ini. Modal-modal tersebut terutama ditanamkan dalam sektor pertambangan dan perkebunan-perkebunan besar.

Salah satu ciri utama yang dimiliki oleh para penganut paham liberalisme adalah pendapat yang mengatakan bahwa negara (pemerintah) sepatutnya tidak perlu campur tangan dalam kehidupan ekonomi, tetapi membiarkannya berada dalam kekuatan-kekuatan pasar. Sedangkan tugas negara hanya menjamin terpeliharanya ketertiban dan menegakan hukum (*rust en orde*), agar dengan demikian kehidupan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga berharap atau bahkan menganjurkan negara menyiapkan infrastruktur yang memungkinkan, memudahkan, dan menggeliatnya berbagai usaha para pemilik modal.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka wajar saja kalau para penganut liberalisme sangat menentang praktik tanam paksa di Hindia Belanda. Praktik tanam paksa memang sangat menguntungkan, tetapi keuntungan itu sebagian besar atau hampir semuanya hanya diperoleh oleh negara. Sedangkan para pemilik modal tidak diberi atau diberi kesempatan yang sangat terbatas untuk mencicipi laba tersebut. Maka dilatarbelakangi oleh pemikiran tersebut di atas, wajar pula kalau pengikut liberalisme begitu mengutuk tanam paksa dan meniup-niupkan janji akan perbaikan tata hidup dan kehidupan rakyat Indonesia lewat sistem ekonomi liberal.

Walaupun para pengikut liberalisme di Negeri Belanda – juga di Indonesia -sangat keras mengecam peranan negara (pemerintah) Hindia Belanda selama zaman tanam paksa, namun mereka juga memandang bahwa Hindia Belanda pada prinsipnya hanya sebuah perusahaan yang harus menghasilkan laba. Perbedaan mereka dengan orang-orang konservatif seperti van den Bosch dan tokoh-tokoh pendukung sistem tanam paksa lainnya, hanya terletak dalam gambaran mereka tentang tanah koloni, jika van den Bosch dan kawan-kawannya memandang Hindia Belanda sebagai suatu "perusahaan negara", maka para penganut liberalisme menganggap daerah koloni sebagai suatu "perusahaan swasta". Akan tetap keduanya tetap menghendaki bahwa "perusahaan" ini haruslah menghasilkan laba dan keuntungan itu mestilah ditransfer ke negeri induk atau ke kantong-kantong mereka. Kenyataan ini sudah pasti akan membawa implikasi, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal ini tidak akan lebih baik dari praktik tanam paksa. Penderitaan dan kemiskinan rakyat tetap saja berlanjut, berbagai pertambangan dan perkebunan hanya membawa kesejahteraan pada segelintir orang dan sebagian besar warga masyarakat tetap miskin dan menderita, serta hampir tidak mendapat limpahan hasil

³ Sebuah kajian yang membahas praktik tanam paksa kopi di Sumatera Barat dengan komprehensif dapat dilihat pada Mestika Zed, "Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Ekonomi Kolonial Belanda di Sumatera Barat (1847-1908)", *Tesis M.A.*, Fak. Pasca Sarjana UI, 1983.

pertambangan atau perkebunan yang dibuka oleh para pemilik modal itu. Tidak itu saja, beberapa prasarana dan sarana yang diciptakan, seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, pedati, kereta api, kapal laut, irigasi, pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya, yang semula dikatakan untuk menyejahterakan rakyat, ternyata hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan yang dibuka. Berbagai produk hukum yang dihasilkan, seperti Agrarische Wet tahun 1870, yang semula dikatakan juga untuk memberikan kejelasan hak masyarakat atas tanah, juga dimanfaatkan oleh pemilik modal. Undang-undang Agraria ini bahkan memberi peluang kepada para pemilik modal (orang asing) untuk menyewa tanah dari atau menguasai tanah dari rakyat.

2. Pengalaman Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki pengalaman yang sangat berbeda dengan di Pulau Jawa. Praktik tanam paksa tetap dilanjutkan di daerah ini hingga awal abad ke-20. Memang ada ada suara yang menginginkan penghapusan praktik tanam paksa di daerah ini sejak dekade 1870-an, namun pemerintah tidak mengakomodirnya. Pemerintah tetap bersikokoh mempertahankan praktik ekonomi ini. Kekerasannya itu setidaknya menggambarkan keangkuhan politik kolonialis, sebuah ciri penjajah dan penguasa yang mau benar sendiri.⁴

Di sisi lain, mengikut apa yang terjadi di Pulau Jawa, modal-modal swasta juga masuk dan ditanamkan di daerah ini sejak dekade 1870-an. Akibatnya, Sumatera Barat mengalami dua eksploitasi ekonomi sekaligus, tanam paksa dan ekonomi liberal.

Pemerintah Belanda memperkenalkan tanam paksa di Sumatera Barat hampir 20 tahun lebih lambat dibandingkan dengan Pulau Jawa. Eksploitasi ekonomi ini mulai dipraktikkan tahun 1847 dengan sejumlah ketentuan, antara lain setiap keluarga harus menanam dan merawat 150 batang kopi (tidak ada praktik penanaman tanaman perdagangan yang lain) dan menjual hasilnya ke gudang-gudang yang ditetapkan pemerintah. Gudang-gudang dibangun oleh pemerintah dan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Gudang-gudang yang dibangun itu umumnya berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan itu dijalin berkat adanya jalan raya. Jalan raya tersebut terhubung dengan daerah pantai dan dengan menggunakan jalan raya itulah kopi dibawa ke pusat pengumpulan di Padang.

Untuk mendukung pelaksanaan tanam paksa kopi inilah sejumlah tindakan dilakukan. Guna menyukseskan penanaman, perawatan, pemanenan, dan pengumpulan kopi oleh penduduk maka pemerintah menciptakan jabatan-jabatan tertentu (khusus) di samping jabatan-jabatan resmi dalam struktur *inlandsche bestuurnya* di daerah ini. Seperti menciptakan 'mandor kopi' di samping kepala nagari dan tuanku laleh. Para pejabat ini dituntut untuk mengontrol masyarakat agar lebih serius dengan penanaman, perawatan dan pemanenan serta pengumpulan kopi. Untuk melancarkan kegiatan di gudang-gudang kopi, terutama kegiatan pembukuan, pencatatan kopi yang masuk dan keluar, maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar guna

⁴ Di dalam samping Mestika Zed (1983), informasi mengenai praktik tanam paksa kopi serta perdebatan mengenai keinginan untuk mengakhiri serta mempertahankan keberadaannya juga bisa ditemukan dalam Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hal. 91-115.

menghasilkan tenaga terampil (tulis baca). Dalam hubungan dengan inilah dibukanya beberapa sekolah nagari (sekolah dasar) di beberapa daerah, terutama di lokasi-lokasi gudang kopi berada (Graves 1970; Mestika Zed 1983; Rusli Amran 1984). Guna melancarkan pengangkutan kopi dari gudang di daerah pedalaman ke pantai untuk selanjutnya dibawa ke pusat pengumpulan di Padang maka diperkenalkanlah *pachter*, yaitu para pengusaha pemegang hak pengangkutan kopi yang memiliki armada pengangkutan, mulai dari kuda beban hingga pedati dan perahu (kapal). Para *pachter* ini terdiri dari pengusaha Eropa, China dan juga urang awak (Gusti Asnan 2006: 143ff).

Seperti yang disebut di atas, tanam paksa memang tidak serta-merta tamat riwayat di Sumatera Barat ketika praktik ini diakhiri di Pulau Jawa. Ada penolakan yang cukup lantang dari pemerintah untuk menyudahinya di daerah ini. Dengan berbagai alasan keberadaan *culturstelsel* ini tetap dipertahankan.

Sikap ini bisa dibuktikan dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa produksi kopi hasil tanam paksa ini hanya memuaskan hingga tahun 1870-an. Data-data berhubungan tanam paksa kopi ini hanya menyajikan kisah suksesnya pada tiga dekade pertama pelaksanaannya. Dalam artian jumlah kopi yang berhasil dikumpulkan rata-rata lebih dari 100.000 pikul per tahun.⁵ Setelah itu jumlah produksi cenderung menurun dan bahkan hampir tidak mendatangkan keuntungan lagi bagi pemerintah (“Statistiek Betreffende de Productie, Prijzen en Uitvoer van Padang Koffie”, 1897).

Masuk dan hadirnya para pemilik modal di Sumatera Barat sesungguhnya bersamaan dengan mulai mundurnya produksi kopi. Para insinyur yang meneliti cadangan berbagai mineral di Sumatera Barat memulai kegiatan mereka pada dekade 1860-an. Ada sejumlah nama yang pantas disebut di sini yang telah melakukan penelitian mengenai kekayaan alam Sumatera Barat, di antara P.J. Maier, J.H. Croockewit Hzn, O.F.U.J. Huguenin, P. Van Dijk, J. Gersen, L.B. van Polanen Petel, H.M. Andre Wiltens, A.G. Veltman, Verbeck, Ijzerman, dslnya. Berbagai penelitian mengenai kekayaan daerah, mulai batubara di kawasan Sawahlunto dan Sinjunjung, biji besi di Tanah Datar, emas di Pesisir Selatan, Limapuluh Kota dan Pasaman hingga minyak bumi marak dilaksanakan sejak dasawarsa 1860-an. Termasuk di antaranya penelitian mengenai cadangan kapur (semen) di Indarung.

Kegiatan penelitian pisik ini kemudian diiringi dengan 'rekayasa' sosial dan budaya yakni pembuatan produk hukum untuk mendapatkan tanah yang memungkinkan pertambangan atau perkebunan nantinya bisa dibuka. 'Rekayasa' ini perlu dilakukan, karena persoalan tanah merupakan persoalan yang paling rumit di Sumatera Barat saat itu. Dan perlu dicatat, 'rekayasa' tersebut hanya menuai sukses karena dilakukan dengan cara-cara kolonialis. Cara-cara yang ditandai dengan trik-trik yang licik, curang dan tindakan represif. Rusli Amran dalam bukunya *Sumatera Barat Plakat Panjang* mendeskripsikan dengan baik lika-liku 'rekayasa' yang dilakukan aparat dan orang pintar penjajah itu untuk mendapatkan berbagai 'hak' atas tanah orang Minang (Rusli Amran 1985: 254-275).

⁵ 1 pikul setara dengan 61,76 kg.

Semua yang telah dipersiapkan pemerintah ternyata juga dimanfaatkan oleh para pemilik modal. Jelas ini semua sangat menguntungkan mereka. Hal ini terlihat – setidaknya – dari kasus NIPCM.

D. PENUTUP

NIPCM adalah anak kandung politik ekonomi liberal. Seperti yang disebut di atas, perusahaan ini lahir pada saat dipraktikannya ekonomi liberal di Indonesia. Perusahaan ini dimiliki dan dijalankan oleh pihak swasta serta para pemiliknya berada nun jauh di seberang sana (Negeri Belanda). Kepemilikan mereka hanya didasarkan pada helaihan saham yang dimiliki. Secara fisik – sebagian besar dari mereka - tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya kondisi perusahaan. Para pemiliknya juga hampir tidak tahu (atau tidak mau tahu) mengenai dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat lokal yang disebabkan oleh perusahaan mereka. Sesuatu yang paling penting bagi mereka adalah perusahaan berjalan dengan baik dan mengirimkan keuntungan bagi mereka.

Dalam pembangunan, produksi dan distribusi, perusahaan mendapat banyak kemudahan dari sejumlah kegiatan/program yang dilaksanakan pemerintah. Lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan pabrik dan pengambilan material yang menurut *Particuliere Landbouw...*(1916: 332) berada pada perceleen Indarung I dan Indarung II serta Bukit Ngalau I dan Bukit Ngalau II. Lahan ini disewa f 2,- per bau per tahun untuk Indarung I, f. F 37,- per bau per tahun untuk Indarung II, f 2,- per bau per tahun untuk Bukit Ngalau I dan f. 36,- per bau per tahun untuk Bukit Ngalau II. Hak untuk memanfaatkan lahan ini oleh perusahaan dimungkinkan oleh adanya Agrarische Wet yang diundangkan tahun 1870. Menurut bahasa pemerintah, pembuatan undang-undang yang lebih populer dikenal dengan sebutan Undang-undang Agraria itu ditujukan untuk melindungi petani-petani (pemilik tanah) terhadap kehilangan hak-miliknya atas tanah mereka dari penyerobotan para pemilik modal. Di Sumatera Barat sendiri pembuatan produk hukum guna mendapatkan hak penggunaan tanah ini oleh negara atau pemilik modal memiliki sejarah tersendiri dan sangat menarik. Namun, harus diakui, diperolehnya lahan oleh NIPCM untuk membangun pabriknya disebabkan oleh adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh pemerintah kolonial dalam membuat produk hukum sehingga memungkinkan “hak” atas tanah orang Minang dimanfaatkan oleh pihak lain, sesuatu yang secara “ideal” tidak mungkin dilakukan.

Proses pembangunan, produksi dan distribusi juga banyak dibantu oleh berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Alat-alat atau barang-barang yang dibutuhkan untuk bangunan pabrik, yang sebagian besarnya didatangkan dari luar daerah (bahkan juga dari Eropa) dengan mudah bisa sampai ke lokasi pabrik karena prasarana untuk itu telah tersedia, seperti pelabuhan laut dan jalan raya. Sejak sepuluh tahun terakhir abad ke-19 pemerintah telah membangun Emmahaven, salah satu pelabuhan laut terancang di Asia Tenggara waktu itu. Pelabuhan inilah yang digunakan untuk menurunkan berbagai alat-alat dan barang-barang yang dibutuhkan pabrik. Alat-alat atau barang-barang itu kemudian dibawa dari pelabuhan ke lokasi pabrik. Jalan raya adalah prasarana yang dibutuhkan dan itu tidak menjadi masalah. Sejak perempat ketiga abad ke-19 pemerintah telah membangun (meningkatkan kondisi) jalan raya Padang – Solok, dan jalan inilah yang digunakan untuk membawa berbagai alat dan barang yang dibutuhkan pabrik.

Ketika pabrik telah berproduksi dan hasilnya mesti didistribusikan, sekali lagi NIPCM mendapat kemudahan dari berbagai prasarana yang telah dibuat pemerintah. Distribusi semen di tingkat lokal dimudahkan dengan tersedianya jaringan jalan raya yang menjangkau hampir semua daerah di Sumatera Barat (jaringan jalan raya telah dibangun di Sumatera Barat sejak perempat kedua abad ke-19 dan kondisinya semakin bagus serta jaringannya semakin luas pada parohan kedua abad ke-19). Di samping itu, sejak dekade terakhir abad ke-19 juga ada jalan kereta api yang menghubungkan banyak daerah di Sumatera Barat. Ini semua dapat dimanfaatkan NIPCM untuk memasarkan produknya. Guna distribusi ke luar daerah, NIPCM juga dimudahkan oleh tersedianya Emmahaven. Pada saat perusahaan ini mulai beroperasi, Emmahaven termasuk salah satu pelabuhan yang sibuk di Hindia Belanda. Di samping secara rutin dikunjungi oleh kapal-kapal KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij), pelabuhan ini juga disinggahi oleh berbagai perusahaan lain, baik dalam perjalanan mereka dari Batavia ke Eropa atau sebaliknya, seperti *Rotterdamsche Lyod*, *Stoomvaart Maatschappij Rotterdam*, *DADG*, *Blue Funel* dan berbagai perusahaan perkapalan lainnya (*Statistiek van de Scheepvaart.....*(beberapa edisi sejak tahun 1910).

Menurut *VKKNP 1911* NIPCM yang baru mulai berproduksi saat itu pasti memberikan keuntungan pada daerah. Daerah tidak akan banyak lagi mendatangkan (mengimpor) semen dari luar (Eropa). Pernyataan serupa diulang lagi dalam beberapa kesempatan oleh para petinggi lembaga ini. Dan memang dari tahun ke tahun NIPCM membukukan prestasi, produksi dan keuntungan yang cukup menggembirakan. Sehingga Kadin Padang dalam laporan tahunnya hampir selalu menyebut keberhasilan perusahaan ini sebagai suatu yang membanggakan daerah (kecuali untuk laporan tahunan sekitar PD I) (*VKKNP....1909, 1911, 1917*). Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Suryadi, bahwa dua tahun setelah beroperasi modal Semen Padang meningkat menjadi f. 2.150.000,- (*Singgalang*, 4 Februari 2010). Penambahan modal ini (dengan penambahan kepemilikan saham) jelas berarti adanya laporan atau hasil positif dari usaha.

Keuntungan (langsung) lain apakah yang diperoleh daerah dengan adanya NIPCM?

Keberadaan NIPCM di Indarung yang terletak di kawasan sebelah timur kota Padang sangat menarik diungkapkan melalui perpespektif pembangunan wilayah. Hadirnya NIPCM di kawasan itu ternyata bagaikan magnet yang membuat 'bangkitnya' kawasan di sebelah timur kota Padang itu. Kebetulan atau tidak sejak dibangunnya NIPCM kawasan ini, sebuah wilayah "baru" bagi kota Padang segera muncul. Bila hingga perempat ketiga abad ke-19 kota Padang lebih terbatas pada kawasan sekitar Muaro dan Belantung, dan sejak perempat terakhir abad ke-19 'perluasan' kota itu mengarah ke selatan, seiring dengan pembangunan Emmahaven, maka sejak NIPCM dibangun pertumbuhan kota Padang mengarah ke kawasan timur. Di kawasan timur inilah kemudian dibangun Zwembad (kolam renang) serta kompleks rekreasi Welkom di daerah Lubuk Begalung, dan kemudian sejumlah perkebunan dan usaha peternakan di kawasan Rimbo Data dan Gadut. Sejumlah pengusaha yang tercatat membuka usaha ke kawasan 'baru' ini adalah J. de Corte di Tanah Sirah, Ranghiang gelar Radja Moga dan Si Noeroet gelar Radja Indo di Rimbo Piee, Mohammad Saleh Ensoof Angullia di Gadut, K. Boumer, J. Schild, H. Evers, E.F.O. Grosskunne, Th. M.H. Janseens, E.F.L.B. Ritter, S. Ouwenhand, Erven J.U.

Wegmuller, E.F.W. Schiueter, H.F.A. Groth, E.I. Wachendorf di Rimbo Datar dan Gadut serta Ulu Gadut (*Particuliere Landbouw Nijverheid...* 1916: 332; Gusti Asnan, *Monografi Nagari Lubuk Kilangan* 2000:3). Di samping itu, penduduk 'bumiputera' juga banyak yang pindah serta membangun rumah tinggal di sepanjang jalan antara pusat kota dengan lokasi NIPCM. Dalam konteks inilah sesungguhnya bisa dipahami bahwa hampir semua pemukiman sepanjang jalan antara pusat kota dengan Indarung sebagai 'pemukiman baru' yang relatif berbeda dengan pemukiman (perkampungan) di kawasan Pauh, Alai-Ampang dan Kuranji yang merupakan perkampungan tua, yang sejarahnya bisa ditelusuri pada masa-masa VOC atau sebelum kompeni itu bercokol di Muaro.

Keuntungan lain dan dampak lain dari kehadiran NIPCM ini silahkan baca buku Mestika Zed dkk. yang telah diterbitkan atau buku baru yang akan ditulis dan dipublikasikan. Mari.....

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amran, Rusli, 1985. *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan,
- Asnan, Gusti, 2006. *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat: Dari VOC hingga Reformasi*. Yogyakarta: Dian Pustaka.
- , 2006. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak,
- , 1991. "Fase Perkebunan Besar: Eksploitasi Ekonomi Belanda di Sumatera Barat Akhir Abad XIX" *Laporan Penelitian*, PPUA.,
- Bernard, Ch., 1913. *Theecultuur op Sumatra*. Batavia: Dep. Landbouw, Nijverheid en Handel.
- Burger, D.H. 1977. *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita,
- Colombijn, Freek, 1994. *Patches of Padang: The History of an Indonesia Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space*. Leiden: Research School CNWS.
- Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. 's-Gravenhage-Leiden: 1917. Martinus Nijhoff-E.J. Brill,
- Joustra, M. 1923. *Minangkabau: Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk*. Leiden: Drukkerij Louis H. Becherer.
- Particuliere Landbouw Nijverheid: Lijst van Ondernemingen 1916*. 1918. Batavia: Landbouw, „Statistiek Betreffende de Productie, Prijzen en Uitvoer van Padang Koffie”, *TvNL*, 53, 1897, hal. 58-63.
- Suryadi, "Melacak Arsip Semen Padang di Belanda", *Singgalang*, 26 Januari 2010.
- , "Statuta Pendirian NV NI-PCM: Cikal Bakal PT. Semen Padang", *Singgalang*, 4 Februari 2010.
- Verbeek, R.D.M., 1883. *Topographische en Geologische Beschrijving van het Gedeelte van Sumatra's Westkust*. Batavia: Landsdrukkerij,
- Verslag van de Kamer van oophandel en Nijverheid te Padang* (beberapa edisi).
- Zed, Mestika, Hasril Chaniago, Khairul Jasmi, 2001. *Indarung: Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.,
- —, th....., *Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Ekonomi Kolonial Belanda di Sumatera Barat*.